

## Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Pulau Madinah, Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

\* Yopy Mutiara<sup>1</sup>, Rahyunir Rauf<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : Yopymutiara@student.uir.ac.id

### Abstrak

Pembangunan Infrastruktur desa yang efektif dan efisien sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan suatu desa. Sehingga dengan jelasnya Transparansi terhadap aliran anggaran dana akan memudahkan masyarakat untuk mengontrol dan dengan demikian keberlangsungan pembangunan infrastruktur desa akan semakin berkembang. Maka dengan demikian penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui tentang Evaluasi pembangunan infrastruktur desa dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Pulau Madinah kecamatan Kuantan Hilir Kabupatn Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Dunn 2013 dengan metode penelitian kualitatif dan adapun hasil penelitian ialah Efektifitas berdasarkan hasil pengamatan penulis untuk program yang dimiliki oleh pemerintah desa Pulau Madinah masih tertinggal dari desa-desa tetangga, pemerintah desa lainnya memiliki program pembangunan infrastruktur yang lebih terawat dan masih aktif digunakan oleh masrayakat setempat. Hasil penelitian perkembangan setiap program yang dilakukan oleh pemerintah desa terus berjalan namun memang untuk perkembangan pembangunan infrastruktur desa menjadi terhambat dikarenakan kurangnya anggaran dana desa, dengan anggaran seadanya program pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik dan terus berkembang walaupun masih banyak kekurangan serta manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Kendala Dalam Pengembangan Penghambat yang paling utama adalah kurangnya anggaran dana desa untuk mengembagkan pembangunan infrastruktur desa. Sebaiknya pemerintah desa pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhan Desa dan usulan masyarakat Desa.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Pembangunan, Infrastruktur Desa.

### Abstract

*Effective and efficient village infrastructure development is crucial for village sustainability and progress. Transparency in budget flows facilitates public oversight, further enhancing the sustainability of village infrastructure development. Therefore, this study was conducted to determine the evaluation of village infrastructure development and to determine the obstacles in implementing infrastructure development in Pulau Madinah Village, Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency. This study uses Dunn's Evaluation Theory in 2013 with a qualitative research method and the results of the study are that the effectiveness based on the author's observations for the programs owned by the village government of Pulau Madinah is still lagging behind compared to neighboring villages, other village governments have infrastructure development programs that are better maintained and are still actively used by the local community. Research results on the development of each program carried out by the village government continue to run, but indeed the development of village infrastructure development is hampered by the lack of village funds, with the existing budget the infrastructure development program is running well and continues to develop although there are still many shortcomings and the benefits can also be felt by all levels of village society. Obstacles in Development The most important obstacle is the lack of village funds to develop village infrastructure development. The village government should build village infrastructure according to the needs of the Village and the proposals of the Village community.*

**Keywords:** Evaluation, Development, Village Infrastructure.

## PENDAHULUAN

Pada wilayah di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa tentunya kewenangan setiap pemerintah berbeda-beda sesuai dengan penempatannya wilayah yang memiliki wewenang peraturannya guna mengurus pemerintahannya sesuai dengan diamanatkan undang-undang yang mengatur. Penetapan undang-undang bahwasanya menghormati adanya penetapan persatuan masyarakat adat dimana negara memberikan hak tradisional sesuai dengan budaya dan adat yang dimiliki masyarakat adat sepanjang masih di dalam kehidupan masyarakat adat dan memegang prinsip negara kesatuan tanah air Indonesia, hal ini termuat pada pasal 18 B ayat UUD 1945, untuk itu negara Indonesia mengakui adanya pemerintahan daerah baik provinsi kabupaten dan kota serta kecamatan dan desa.

Pemerintah Daerah berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan tujuan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah guna menjalankan tugas fungsi dan wewenang, seiring perkembangan zaman pada era reformasi banyak mengalami perubahan baik pemerintah daerah maupun tingkat pusat hal ini terlihat dari perubahan pada tingkat daerah adalah dengan pemberian kewenangan pada pemerintah daerah guna mengurus sendiri rumah tangganya masing-masing.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan kegiatan pembangunan desa tentunya hal ini menjadi prioritas pemerintah Desa. Pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur desa tentunya mendorong pertumbuhan kemajuan Desa yaitu ekonomi lokal, meningkatkan akses layanan publik, serta meningkatkan peluang usaha dan lapangan kerja, namun pada kenyataannya bahwasan belum semua desa memiliki pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan desa bahkan masih mengalami kurangnya fasilitas layanan dasar. Pertumbuhan infrastruktur yang baik seperti jalan, air bersih serta listrik tentunya membuka aksesibilitas dan memperlancar distribusi jasa dan barang yang ada di desa. Dengan pembangunan infrastruktur Desa sangat berperan guna meningkatkan kemajuan Desa serta kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa Pulau Madinah, yang terletak di Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, desa tersebut diketahui memiliki potensi besar dalam kemajuannya dibidang pertanian dan pariwisata namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pembangunan infrastruktur guna mendukung kemajuan desa memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor pariwisata dan pertanian. Namun, masih terdapat keterbatasan infrastruktur yang dapat menghambat perkembangan potensi tersebut, dikarenakan pembangunan infrastruktur menunjukkan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan akses masyarakat, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta perbaikan kondisi tempat tinggal dan sanitasi, namun pada kenyataannya dampak pembangunan infrastruktur tergantung pada karakteristik desa prioritas pembangunan serta keterlibatan pada masyarakat desa.

Pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penetapan sebagai landasan hukum bagi pemerintah Desa guna mengelola pembangunan Desa terutama infrastruktur Desa. Kewenangan melalui undang-undang tersebut kepada pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur Desa sesuai dengan kebutuhan Desa.

Dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pulau Madinah, terdapat berbagai stakeholder yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda. Adapun stakeholder yang terlibat adalah pemerintah desa yang meliputi, Kepala Desa Pulau Madinah yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan proyek pembangunan infrastruktur, dan semua Perangkat desa Pulau Madinah yang bertugas Membantu dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Selain itu Masyarakat Desa juga dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan dukungan dalam pembangunan infrastruktur desa. Stakeholder lain yang ikut dalam pembangunan infrastruktur desa Pulau Madinah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Hilir yang mana bertugas mengawasi dan memberikan bantuan teknis serta regulasi terkait pembangunan infrastruktur desa.

Adapun berikut data Pembangunan infrastruktur di Desa Pulau Madinah Kecamatan Kuantan Hilir Sejak Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Pembangunan infrastruktur di Desa Pulau Madinah Kecamatan Kuantan Hilir Sejak Tahun 2021-2024**

No	Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Desa.	Pembangunan Infrastruktur	Tahun Pembangunan	Sumber dana
1.	Seminisasi jalan desa, Jembatan desa, Box Curver, Penimbunan Bahu Jalan.	1. Pembangunan Jalan bandes semenisasi sepanjang 800 m. 2. Box Curver 2 titi RT 03, RT 05.	2021	APBDES
2.	Lampu penerang jalan, Jembatan desa, semenisasi jalan desa, Box Curver, Penimbunan bahu Jalan.	1. Penyediaan lampu penerangan jalan (PLTS) 40 titik. 2. Penimbunan bahu jalan, 500m.	2022	APBDES
3.	Pembangunan sumur autesis, semenisasi jalan desa, Drainase, Box Curver, Penimbunan bahu Jalan.	1. Pembangunan sumur autesis 1 titik 150m. 2. Drainase 600m, RT 03.	2023	APBDES
4.	Seminisasi jalan desa, Drainase, Box Curver, Penimbunan bahu Jalan.	1. Semenisasi 500m. 2. Drainase 300m. 3. Penimbunan bahu jalan 150m.	2024	APBDES

Sumber : Struktur Apbdes Desa Pulau Madinah Tahun 2021-2024.

Dari pengamatan lapangan ditemukan adapun permasalahan ditemui dilapangan bahwa pemerintah desa dalam perkembangan pembangunan infrastruktur desa belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan Desa hal ini salah satu menjadi terhambat dikarenakan kurangnya anggaran dana desa. Setiap pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan oleh pemerintah desa terus berjalan namun untuk perkembangan pembangunan menjadi terhambat dikarenakan kurangnya anggaran dana desa sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur belum merata dilakukan.

## METODE

Menganalisa dan menggambarkan pada suatu peristiwa penulis menggunakan semacam studi kualitatif deskriptif dengan melakukan analisa lapangan seperti fakta lapangan, aktivitas kejadian keterlibatan pelaksana, perilaku serta berbagai sudut pandang dan persepsi.

Menurut Sugiyono (2019) penelitian menggunakan metode kualitatif Adalah metode yang digunakan dalam meneliti objek alamiah, yang dimana peneliti instrumen

kunci, dengan melakukan teknik pengumpulan data triangulasi, dimana analisa data bersifat induktif dan menekankan makna dari pada generalisasi pada hasil penelitian.

Informan yang ditetapkan dari Kepala Desa sebagai Key Informan, serta yang menjadi informan yaitu Sekretaris Desa Pulau Madinah, Kaur Umum dan Perencanaan Desa Pulau Madinah, BPD dan Masyarakat desa. Analisis data penelitian yang dilakukan adalah dengan Reduksi Data, Penyajian Data lapangan serta Menarik Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Dunn, 2013) evaluasi adalah suatu cara atau proses yang terjadi untuk melihat suatu sistem kebijakan yang dilakukan oleh suatu kelompok Beberapa Kriteria yang harus dilakukan evaluasi adalah mengenai :

### 1. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil tersebut telah tepat sasaran dan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik.

### 2. Efisiensi

Efisiensi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah efektivitas yang telah dinilai sebelumnya sudah efektif atau belum.

### 3. Kecukupan

Kecukupan ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah dari suatu efektifitas yang telah dilihat sebelumnya yaitu mengenai kecukupan nilai, pemuasan kebutuhan, serta adanya kemungkinan tumbuhnya masalah baru atas dasar kurangnya kecukupan tersebut.

### 4. Pemerataan

Pemerataan disini maksudnya apakah suatu kebijakan dan pembagian yang dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan tersebut apakah sudah merata atau masih ada yang belum tercover secara keseluruhan.

### 5. Responsivitas

Responsivitas ini adalah untuk melihat seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan yang dilakukan.

### 6. Ketepatan

Ketepatan ini akan berorientasi kepada apakah suatu kebijakan yang di ambil telah tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

Menurut Nurcholis (2021 : 2) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sebagian besar mata pencahariannya adalah petani dan nelayan.

Menurut Sunardjo dalam Wasistiono (2020 : 9) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

Menurut (Kuncoro 2021:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan

yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya

Menurut Asnudin A, (2025) adalah Infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Adapun Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

### 1. Efektifitas

Sub indikator pembahasan penelitian mengenai Indikator Efektifitas antara lain sebagai berikut :

#### a. Program yang dimiliki Pemerintah Desa dalam pengelolaan Infrastruktur

Berdasarkan analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur meliputi sumur artesis, MCK, posko Posyandu, drainase, semenisasi, lampu penerangan pemukiman, jalan usaha tani dan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis untuk program yang dimiliki oleh pemerintah desa Pulau Madinah masih tertinggal dari desa-desa tetangga, pemerintah desa lainnya memiliki program pembangunan infrastruktur yang lebih terawat dan masih aktif digunakan oleh masyarakat setempat.

#### b. Proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur desa namun pada kenyataannya tugas tersebut belum maksimal dijalankan dengan baik kepala desa sebagai penasehat dan pengawas kurang menjalankan perannya terbukti dengan tidak adanya perbaikan terhadap infrastruktur desa yang sudah dibangun bahkan Pada tahun pertama kepala desa menjabat belum ada program-program yang dijalankan khususnya evaluasi pada pembangunan infrastruktur yang telah dibangun oleh kepala desa sebelumnya dengan alasan bahwa anggaran program pembangunan desa tidak mencukupi untuk melakukan evaluasi terhadap bangunan infrastruktur desa tersebut. Selain itu program-program yang mendukung pemberdayaan Masyarakat seperti pelatihan dan Kemahiran dalam melakukan sebuah profesi pada eksekusinya belum terlihat sama sekali terhadap pemberdayaan Masyarakat maka dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa bukan hanya program pembangunan infrastruktur desa yang harus dilakukan evaluasi namun juga peran kepala desa sebagai pengawas dan juga penasehat harus lebih di tingkatkan.

### 2. Efisiensi

Sub indikator pembahasan penelitian mengenai Indikator Efisiensi antara lain sebagai berikut :

#### a. Perkembangan program Infrastruktur Desa

Berdasarkan analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur melalui Perkembangan pembangunan infrastruktur desa tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya anggaran desa apalagi jika dibandingkan dengan program-program pembangunan infrastruktur desa lain yang memiliki banyak program pembangunan seperti adanya MDA dan taman bermain. setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa terus berjalan namun memang untuk perkembangan pembangunan infrastruktur menjadi terhambat dikarenakan kurangnya anggaran dana oleh desa.

### 3. Kecukupan

Sub indikator pembahasan penelitian mengenai Indikator Kecukupan antara lain sebagai berikut :

#### a. Manfaat program pembangunan infrastruktur desa bagi masyarakat

Berdasarkan analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa program yang di adakan oleh pemerintah desa di harapkan mampu untuk meningkatkan perkembangan perekonomian Masyarakat seperti pembangunan jalan usaha tani yang diberikan kepada Masyarakat untuk memudahkan akses menuju tempat pertanian dan di bangun sumur artesis juga bertujuan untuk membantu Masyarakat untuk mengaliri persawahan dan siap menghadapi musim kemarau pada saat musim tanam padi agar terhindar dari kekeringan dan gagal panen akibat kekurangan air.

**b. Penilaian masyarakat terhadap kinerja pembangunan infrastruktur desa**

Berdasarkan analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat mendukung atas seluruh program yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat merasa program- program pembangunan infrastruktur desa dapat membantu pertumbuhan perekonomian desa dan program- program pemerintah desa juga dapat memudahkan masyarakat Desa Pulau Madinah maka harapan masyarakat kepada pemerintah desa.

**4. Pemerataan**

Sub indikator pembahasan penelitian mengenai Indikator Pemerataan antara lain sebagai berikut :

**a. Semua masyarakat merasakan manfaat dari program pembangunan infrastruktur desa**

Berdasarkan analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa program yang dipilih dalam pembangunan jalan usaha tani dan sumur arthesis sudah melalui pertimbangan yang matang dan dipilih lah suatu program yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Desa Pulau Madinah sehingga pemerataan dapat dilakukan dengan baik walaupun untuk beberapa tahun ini manfaat dari perairan sumur artesis terhambat karena adanya aliran sumur yang tidak mengalir seperti biasanya. Pengguna pembangunan infrastruktur desa merupakan seluruh masyarakat desa tidak hanya menggunakan jalan desa usaha tani untuk mempermudah akses pertanian dan juga bisa mempercepat kegiatan di pertanian, untuk sumur arthesis selain digunakan masyarakat untuk mengaliri sawah juga merupakan sumber air bersih pada saat kemarau panjang.

**5. Responsivitas**

Sub indikator pembahasan penelitian mengenai Indikator Responsivitas antara lain sebagai berikut :

**a. Peran pemerintah desa dalam membantu perkembangan program pembangunan infrastruktur Desa**

Berdasarkan analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam program pembangunan infrastruktur desa selaku kepala desa di tunjuk sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan program-program pembangunan infrastruktur desa yang mana dalam tugas disebutkan dalam UU no 6 tahu 2014 tentunya saya sebagai kepala desa dan sebagai penanggung jawab akan menjalankan fungsi dan tugas saya dengan sebaik mungkin.

**6. Ketepatan**

Sub indikator pembahasan penelitian mengenai Indikator Ketepatan antara lain sebagai berikut :

**a. Program pembangunan infrastruktur desa berkembang dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat**

Berdasarkan analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastrutur desa berkembang dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat ialah sebagai berikut: Untuk saat ini walaupun dengan anggaran seadanya program pembangunan infrastrutur berjalan dengan baik dan terus berkembang

walaupun masih banyak kekurangan serta manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

## SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisa penelitian diketahui bahwa Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Pulau Madinah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dilihat dari indikator penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Pembangunan infrastruktur Desa belum dilakukan secara merata sesuai dengan kebutuhan Pembangunan desa, dan belum dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa serta kurangnya anggaran desa guna dilakukan pemerataan Pembangunan infrastruktur Desa sehingga Pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap di setiap tahunnya.
2. Sementara faktor-faktor hambatan pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Pulau Madinah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau diketahui bahwa :
  - a. Diketahui kurangnya anggaran dana desa untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur desa.
  - b. Tugas kepala desa yang terlalu banyak sehingga mengerjakan tugas untuk melakukan pengawasan dan penasehat dalam pembangunan infrastruktur Desa menjadi tidak optimal.
  - c. Kemudian kurangnya saran dan masukan yang membangun untuk pengembangan dan program yang dimiliki pemerintah Desa
  - d. Kurangnya peran serta Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan dimana Masyarakat cenderung pasif dan tidak pernah mau terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa hal tersebut juga di karenakan pemerintah desa juga kurang melibatkan dan mendengar aspirasi Masyarakat untuk membangun desa sehingga Masyarakat terkesan tidak peduli terhadap perkembangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnudin, Ahmad. *Pembangunan Dsa*. Jakarta: Rineka Cipta. 2025
- Dunn, W. N. *Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2013.
- Hanif Nurcholis. 2021. Edisi Revisi. *Teory dan Praktik PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH*. Grasindo.
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.